

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT DENGAR PENDAPAT  
KOMISI II DPR RI**  
**(Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan dan Reforma Agraria)**

---

Tahun Sidang	: 2011-2012
Masa Persidangan	: IV
Rapat Ke	: --
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Selasa, 10 Juli 2012
Waktu	: 15.30 WIB - Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI(Gd. Nusantara/KK.III)
Acara	: Pembahasan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2011
Ketua Rapat	: Ganjar Pranowo/Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dra. Hani Yuliasih/Kabag.Set Komisi II DPR RI
Hadir	: 26 dari jumlah 50 Anggota Komisi II DPR RI
Hadir Mitra	: Sekretaris Utama Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI beserta jajarannya

## **1. PENDAHULUAN**

1. Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2012 dibuka pukul 15.45 WIB yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Yth. Ganjar Pranowo dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan agenda Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretaris Utama Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI beserta jajarannya pada hari ini yakni terkait dengan Pembahasan Pembahasan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2011.
3. Sekretaris Utama BPN RI menyampaikan:
  - a. Pagu anggaran BPN RI pada Tahun Anggaran 2011 adalah sebesar Rp 3.724.065.982.000,- dan sampai dengan 31 Desember 2011 telah terealisasi sebesar Rp 2.657.599.914.400,- atau 71,36%. Adapun realisasi anggaran BPN RI tahun 2011 terdistribusi dalam 4 program sebagai berikut:
    - 1) Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPN dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.530.880.694.000,- telah terealisasi sebesar Rp 1.365.560.009.251,- atau 89,20%.
    - 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur BPN dengan pagu anggaran sebesar Rp 324.141.468.000,- telah terealisasi sebesar Rp 177.070.186.165,- atau 54,63%.

- 3) Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur BPN dengan pagu anggaran sebesar Rp 8.060.000.000,- telah terealisasi sebesar Rp 5.887.489.905,- atau 73,05%
  - 4) Program pengelolaan pertanahan nasional dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.869.043.820.000,- telah terealisasi sebesar Rp 1.109.082.229.079,- atau 59,34%
- b. Terkait dengan Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Tahun 2011, BPN RI mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
- c. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, terdapat pula beberapa temuan kelemahan Sistem Pengendalian Internal dan temuan terhadap pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang perlu mendapat perhatian Kepala BPN RI sebagai berikut :
- 1) Pencatatan dan pelaporan pengiriman Barang Milik Negara dari Kantor Pusat/Kantor Wilayah BPN ke satker tidak dukung aturan yang jelas dan tidak diinventarisasi serta dicatat sesuai berita acara serah terima barang, sehingga nilai peralatan, mesin, dan jaringan yang dikirim dari Kantor Pusat BPN ke satker tidak dapat diyakini kewajarannya.
  - 2) BPN belum menyajikan peta secara lengkap dan sesuai biaya perolehannya serta petunjuk penilaian dan pencatatan peta kurang jelas, sehingga nilai peta yang disajikan di Neraca per 31 Desember 2011 tidak dapat diyakini kewajarannya.
  - 3) Penerimaan hibah secara langsung di BPN tahun 2011 senilai Rp 621,49 juta belum dilaporkan kepada DJPU dan BPN belum mencatat belanja modal sebesar Rp 621,49 juta dan aset tetap yang diperoleh dari hibah senilai Rp 262,70 juta, sehingga terdapat salah saji nilai aset tetap dan belanja, serta kekurangan pengungkapan di CALK BPN tahun 2011.
  - 4) Realisasi belanja perjalanan dinas sebesar Rp 327,78 juta pada Kantor Pusat BPN tidak didukung dengan dokumen pertanggungjawaban yang sah, sehingga negara mengeluarkan biaya perjalanan dinas yang tidak sebenarnya sebesar Rp 327,78 juta tidak sah.
  - 5) Kekurangan pungutan PPh jasa konstruksi atas pembangunan gedung arsip dan renovasi gedung sebesar Rp 159,88 juta serta PPh atas imbalan jasa konsultansi sebesar Rp 6,77 juta di Kantor Pusat BPN, mengakibatkan tertundanya penerimaan negara dari pajak sebesar Rp 166,66 juta.
  - 6) Pekerjaan konstruksi di Kantor Pusat BPN terlambat dikerjakan dan belum dikenakan denda sebesar Rp 967,14 juta sehingga penerimaan negara sebesar Rp 967,14 juta menjadi tertunda.
  - 7) Pekerjaan konstruksi di Kantor Pusat BPN Tahun 2011 yang belum selesai dikerjakan/terpasang saat pemeriksaan fisik sebesar Rp 708,30 juta, sehingga pekerjaan sebesar Rp 708,30 juta tidak dapat segera dimanfaatkan.

## II. KESIMPULAN

1. Terkait dengan Laporan Keuangan Badan Pertanahan Nasional Tahun Anggaran 2011 yang mendapatkan opini **Wajar Dengan Pengecualian (WDP)** dari BPK RI, Komisi II DPR RI memberikan apresiasi terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan sekaligus meminta Badan Pertanahan Nasional dan seluruh jajarannya untuk lebih meningkatkan kinerjanya dalam hal Tata Kelola Administrasi dan keuangannya, agar di tahun-tahun mendatang mampu memperoleh opini WTP. Terhadap berbagai permasalahan yang menjadi temuan BPK RI, Komisi II DPR RI meminta kepada Badan Pertanahan Nasional untuk segera menindaklanjuti sesuai dengan Rekomendasi BPK.
2. Terkait dengan penyerapan anggaran Badan Pertanahan Nasional Tahun Anggaran 2011 yang hanya sebesar **71,36%**, Komisi II DPR RI meminta kepada Badan Pertanahan Nasional agar di tahun-tahun yang akan datang lebih efektif dalam perencanaan anggaran, sehingga tingkat penyerapan anggaran bisa lebih dioptimalkan sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan
3. Terhadap hasil pembahasan Laporan Keuangan Badan Pertanahan Nasional Tahun Anggaran 2011, Komisi II DPR RI akan menyampaikan ke Badan Anggaran DPR RI sebagai acuan dalam rangka pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2011.

## III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 17.30 WIB.

**KETUA RAPAT,**

**GANJAR PRANOWO**  
**A-365**